

**EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN
DI KELURAHAN PUNGGAWAN 2023**

Oleh :

Satrio Anoraga Sunggingprobo¹; Joko Pramono²; Aris Tri Haryanto³

¹ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
satrioanoraga2020@gmail.com. ² Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi
Surakarta. Jokopramono.unisri@gmail.com. ³ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet
Riyadi Surakarta. Aristh68@gmail.com.

ABSTRAK

Upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mengurangi dampak ledakan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga adalah melalui program Keluarga Berencana yang saat ini terdapat di 22 kelurahan, salah satu dari kelurahan tersebut adalah Punggawan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program kampung keluarga berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin oleh Pemerintah Kota Surakarta. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teori William Dunn. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari berbagai narasumber dan data sekunder melalui penelusuran literatur serta beberapa dokumen lain dan teknik penentuan informan dengan purposive sampling. Hasil penelitian adalah ketiga program yaitu sosialisasi, motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi KB dan kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneed*, dan tangani *stunting* dengan JABAT tangani *stunting*, dan edukasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak dengan food model per posyandu dilihat dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan dapat dikatakan baik artinya program berjalan sesuai rencana, anggaran tercukupi dari dinas DP3AP2KB dan swadaya warga, namun pada program edukasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak dengan food model per posyandu pada aspek responsivitas mendapatkan tanggapan memberatkan masyarakat Punggawan jika penanganan *stunting* di bebaskan dengan biaya mandiri.

Kata Kunci: Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB), Evaluasi Program Dengan aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan ,responsivitas dan ketepatan

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah mengenai kepadatan penduduk dan tinggi rendahnya laju pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Dampak akan tingginya pertumbuhan penduduk di tiap tahun memperburuk kondisi sosial di suatu wilayah dan menyebabkan permukiman padat penduduk. Fenomena ini terjadi dikarenakan tingginya angka kelahiran dan angka kematian yang rendah selain itu negara tidak mampu mengimbangi angka pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.

Menilik dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1.13% dari tahun sebelumnya, hal ini merupakan pertumbuhan terendah dalam delapan tahun terakhir. Walaupun laju pertumbuhan penduduk rendah, hal ini berdampak pada penuaan penduduk, penurunan tenaga kerja, masalah keuangan dan sosial, pengurangan keragaman budaya, tantangan dalam sistem kesehatan, kesenjangan generasi.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol adalah dengan melakukan program pengendalian kelahiran yang dikenal sebagai Keluarga Berencana (KB) melalui BKKBN singkatan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk pada kepresidenan Suharto pada era PELITA 1 tahun 1972 berdasarkan Keppres No.8 Tahun 1970. Pada tanggal 28 Januari 1987 presiden Soeharto secara resmi mencanangkan KB Mandiri yang menaungkan setiap pasangan untuk mempunyai dua anak cukup. Dalam perkembangannya, BKKBN berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2009 atas dasar UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, sehingga BKKBN mengalami restrukturisasi dari badan koordinasi menjadi badan kependudukan.

Tujuan dari Keluarga Berencana adalah untuk menaikkan kesejahteraan ibu dan anak dan juga menciptakan keluarga kecil bahagia dengan cara mengkampanyekan pembatasan kelahiran

serta pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Selain itu, diharapkan dengan adanya program-program dari BKKBN dapat mewujudkan penduduk yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya guna.

Demi menambah usaha dalam mewujudkan terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, maka pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mencanangkan pembentukan program Kampung KB (Keluarga Berencana) melalui perantara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu program unggulan BKKBN yang berupaya menangani permasalahan kependudukan dan KB. Di samping itu, ruang lingkup Kampung Keluarga Berencana pun sangat luas karena menyangkut lintas sektor mulai dari kependudukan, kesehatan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip dari program Kampung Keluarga Berencana adalah untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari peningkatan pemahaman dan cara pandang masyarakat terhadap segala hal dan itu bisa

dilakukan di lingkup keluarga. Pada awal mula pembentukan Kampung Keluarga Berencana di tahun 2016, BKKBN memiliki target di mana harus ada satu Kampung Keluarga Berencana di setiap satu kabupaten/kota. Di tahun 2017 targetnya adalah satu Kampung Keluarga Berencana per kecamatan, dan di tahun 2018 targetnya adalah satu Kampung KB per desa/kelurahan. Awal tiga tahun berturut-turut ini BKKBN lebih berfokus pada jumlah atau kuantitas Kampung Keluarga Berencana di Indonesia.

Menurut artikel yang ditulis dalam Kompas.id, Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan bahwa pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana tersebut dinilai kurang maksimal akibat kurangnya komitmen dan integrasi antar program di lintas sektor. Oleh sebab itu perlu adanya transformasi melalui pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas. (<https://www.bkkbn.go.id/berita-inpres-kampung-kb-perkuat-institusi-keluarga>)

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka meningkatkan

sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa dan kelurahan.

Kota Surakarta menjadi kota terpadat di Jawa Tengah pada tahun 2022 yang memiliki jumlah penduduk mencapai 523.008 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11.361 jiwa/km², dan laju pertumbuhan penduduk 2,42%. Dengan hal ini menjadikan kota Surakarta sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi. Sedangkan dalam tingkat kemiskinan terdapat 8,84 % persentasi penduduk miskin yaitu sejumlah 45.940/jiwa. Selain itu terdapat indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dalam satu dekade pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 meningkat dari 78,44 menjadi 83,08, peningkatan ini hanya tumbuh sebesar 0,46% pertahun.

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/02/solo-kota-terpadat-di-jawa-tengah-pada-2021>)

Upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mengurangi dampak ledakan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga adalah melalui program kampung Keluarga Berencana yang saat ini terdapat

di 22 kelurahan, akan tetapi melalui program tersebut tidak memberi dampak signifikan. Masalah ini terjadi dikarenakan pemerintah kota Surakarta hanya berfokus pada peningkatan jumlah sasaran program dan kurangnya komitmen maupun integrasi program kegiatan lintas sektor. Oleh sebab itu dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.33 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan mampu memberi dampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengendalian penduduk.

KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24). Menurut Dunn (1994) proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang

bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung.

Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dunn (1998: 608-609), evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut. (1) Fokus nilai Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. (2) Interdependensi fakta nilai Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh

masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. (3) Orientasi masa kini dan masa lampau Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan. (4) Dualitas nilai Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn diatas

menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut: (1) Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,

selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (2) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. (3) Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. (4) Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (5) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan

aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. (6) Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Teori Program

Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012: 11), Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada evaluasi program kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan Punggawan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data primer

didapatkan melalui wawancara langsung yang diperlukan untuk mengetahui evaluasi program kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan Punggawan. Sumber data primer pada penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan narasumber yang bersifat *purposive* atau *purposive sampling*. Tujuan *purposive sampling* adalah menggambarkan *uniqueness*, keunikan yang khas yang berbeda dengan kasus lainnya (Slamet, 2019 : 64). Adapun teknik analisis data dengan menggunakan: uji validitas (Kuncoro, 2013 : 172), reliabilitas (Laksono, 2013:173). dan analisis data interaktif (Miles & Huberman 2014: 12),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada halaman ini akan disajikan analisa hasil penelitian dengan menggunakan teori W. Dunn dengan 5 indikator dari teorinya tentang evaluasi program, untuk itu dapat disampaikan analisisnya sebagai berikut ini:

1. Sosialisasi, motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi KB (KIE KB) dan Kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneed*

Tujuan dari program tersebut adalah untuk lebih mengenalkan kembali ke masyarakat mengenai KB dan alat kontrasepsi yang diwujudkan kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum melaksanakan KB baik Non MKJP maupun MKJP (Metode kontrasepsi jangka panjang) agar mendapatkan manfaat yang baik dalam berumah tangga dikatakan efektif jika tujuan program dapat tercapai, pada program ini , sosialisasi dapat dilaksanakandengan 2 cara yaitu sosialisasi dengan menghadirkan warga di pendopo Kelurahan Punggawan dan dengan metode *door to door* yaitu mendatangi warga secara langsung ke rumahnya serta melayani informasi melalui posyandu , dapat dikatakan program ini telah efektif., hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tesalonika Syele Maleke, Masjey Pangke, dan Deysi Tampongongoy (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tamboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tamboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa

Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi atau turun langsung ke lapangan, wawancara dengan narasumber penelitian, dan dokumentasi tentang penelitian yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa Efektivitas Program Kampung KB di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan sudah efektif.

Pada sisi efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan program. Selain itu anggaran dipergunakan juga untuk pengadaan lembar balik panduan berkontrasepsi. Sehingga dapat dikatakan anggaran tersebut telah terserap. Pada aspek kecukupan, teori Dunn mengatakan, kecukupan tersebut dimaknai dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, dengan demikian melihat berbagai dinamika dari pelaksanaan program, manfaat program dan dampaknya maka dapat dikatakan program ini telah mampu memberikan solusi atau pemecahan masalah yaitu tentang Keluarga Berencana (KB).

Di aspek responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan

dapat memuaskan kebutuhan preferensi yaitu program dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi warga Kelurahan Punggawan. Hal yang terpenting dari pelaksanaan program adalah pada tanggapan warga yang positif dan merasakan manfaatnya.

Selanjutnya evaluasi ketepatan dapat diartikan sebagai seberapa jauh suatu program memiliki hasil yang bermanfaat untuk itu program sosialisasi, motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi KB (KIE KB) dan Kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneeds* sangat tepat dan memberikan manfaat bagi warga Kampung Punggawan terkait permasalahan KB.

2. Tangani *Stunting* dengan JABAT tangani *stunting*

Stunting adalah kondisi yang ditandai saat tinggi anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. *Stunting* adalah kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek yang tidak sesuai dengan usianya.

Untuk menangani *stunting* ini, pemerintah melakukan upaya pencegahan *stunting* yang diterapkan pada program kampung berkualitas dengan program

Tangani *stunting* dengan JABAT tangani *stunting*.

Evaluasi dari segi efektifitas program, Jenguk dan ambil data anak *stunting* atau JABAT merupakan penanganan *stunting* dengan kegiatan yang berkesinambungan dalam menangani *stunting* melalui program jenguk dan ambil data anak. Program Tangani Stunting dengan JABAT tangani *stunting* berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Program ini memberikan pemahaman akan bahaya *stunting* melalui sosialisasi dan pembinaan tentang bagaimana tatacara mengatasi *stunting* yang mulai dari kesehatan ibu dan kandungan dan kesehatan balita rentan usia 1-3 tahun. Respon warga Punggawan terhadap masalah *stunting* diwujudkan dengan mengelola kebutuhan pangan yang bergizi dan berimbang di lingkungan rumah tangga. Meskipun efektif terdapat kendala saat pelaksanaan program yaitu pada persoalan kemauan pada rumah tangga warga yang belum melaksanakan point-point penting pada materi yang di sampaikan saat sosialisasi seperti pemenuhan nutrisi karena keterbatasan ekonomi, menurut mereka membeli makanan bernutrisi tidak murah. Program telah terlaksana dengan baik.

Pada sisi efisiensi program, menurut teorinya Dunn dikatakan, efisiensi berkaitan dengan kecukupan dana. Untuk program ini Pendanaan sosialisasi dan edukasi program tangani *stunting* dengan JABAT tangani *stunting* di biayai oleh DP3AP2KB namun untuk memenuhi kebutuhan *stunting* pada anak dibiayai oleh swadaya dan bantuan yaitu keterlibatan pendanaan oleh warga punggawan dan Rumah makan WS Warung Steak sehingga dapat dikatakan telah terjadi efisiensi pada anggaran .

Pada aspek kecukupan, oleh Dunn di dikatakan sebagai seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan dan seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah. Keterlibatan program Tangani *stunting* dengan JABAT tangani *stunting* melalui peran DP3AP2KB dapat dirasakan manfaatnya serta menghasilkan dampak yang positif karena program tersebut memberikan pengetahuan yang diharapkan oleh warga kampung Punggawan. Sebelum adanya program JABAT, warga belum begitu banyak mengetahui gejala *stunting* dan dampak *stunting*.

Pada indikator responsivitas dapat dimaknai sebagai apakah program dapat memuaskan dan apakah masalah dapat

tertangani dengan baik, untuk itu evaluasi berdasarkan tingkat responsivitas dapat dikatakan bahwa Program Tangani *stunting* dengan JABAT tangani *stunting* ternyata memberatkan masyarakat punggawan utamanya keluarga miskin jika penanganan anak yang mengalami *stunting* harus membiayai sendiri secara mandiri, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kendala pada program tersebut. Sebenarnya pihak DP3AP2KB dapat memberikan pendanaan perbaikan gizi kepada balita penderita *stunting*. Dengan demikian peran DP3AP2KB tidak lah cukup hanya dengan sosialisasi, edukasi dan pembentukan kader.

Untuk aspek ketepatan, evaluasi didasarkan pada pertanyaan apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Program Tangani *stunting* dengan JABAT tangani *stunting* sudah tepat sasaran dengan terlibatnya warga punggawan terutamanya keluarga miskin. Dari program JABAT tangani *stunting* telah tertangani dua (2) balita terhindar dari *stunting* untuk itu dapat dikatakan program JABAT adalah program yang sangat bermanfaat.

3. Edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model per posyandu.

Program Edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model per posyandu adalah berupa pelatihan dan praktek, program ini bertujuan untuk mengupayakan bayi mendapatkan nutrisi, dan pilihan olahan makanan yang bervariasi dengan tema COKOTAN (Cocok untuk anak atasi *stunting*). Pemberian nutrisi yang tepat bagi bayi tidak dapat terelakan lagi, jika sejak bayi sudah mendapatkan nutrisi yang tepay maka tumbuh kembang bayi juga akan baik. Selama program pelatihan para peserta terlihat bersemangat mengikuti hingga acara selesai. Pelatihan ini juga sebagai media untuk meningkatkan inovasi olahan makanan bergizi dan makanan tambahan melalui variasi olahan sayuran dengan. Yang terpenting adalah variasi makanan akan membuat bayi tertarik dan memudahkan untuk dikonsumsi.

Evaluasi Program ke tiga pada kampung berkualitas menurut Dunn jika ditinjau dari sisi efektifitas program ini telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, pembiayaan program edukasi pemberian makanan dari swadaya warga mencirikan bahwa partisipasi warga kampung Punggawan tumbuh dan bermanfaat untuk menjalankan program.

Selanjutnya adalah evaluasi pada aspek efisiensi, pendanaan program Edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model per posyandu telah memiliki anggaran yang cukup yang dibiayai oleh DP3AP2KB yang memberikan bantuan dana melalui program Dapur Sehat Atasi *Stunting* yang kemudian diwujudkan Program pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model. Pembiayaan dari DP3AP2KB berjalan selama satu tahun sebanyak empat kali.

Sedangkan segi Kecukupan pemberian program Edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model ini dapat memberikan manfaat dan memberikan pemecahan masalah terhadap persoalan kelompok ibu-ibu rumah tangga yang memiliki balita atau anak sehat tetapi juga di khususkan kepada rumah tangga yang memiliki resiko *stunting*.

Evaluasi terhadap responsivitas pada program ini adalah, dengan melalui layanan posyandu di Kelurahan Punggawan fungsi program Edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model dapat terus terlaksana, program ini juga menjadi wadah diskusi bagi kelompok rumah

tangga untuk mengembangkan dan mengelola makanan bergizi yang bervariasi melalui aneka sayuran dan juga menanggapi keluhan kelompok rumah tangga terhadap perkembangan gizi anak.

Selanjutnya evaluasi program berdasarkan ketepatan, memberikan penilaian bahwa pemberian program edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model memberikan dampak baik dan mampu merubah perilaku untuk menerapkan makanan berorientasikan gizi untuk anak dan balita.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan mengenai evaluasi program kampung berkualitas di Kelurahan Punggawan tahun 2023 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa program Sosialisasi, Motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE KB) dan kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneed*, Tangani *Stunting* dengan JABAT Tangani *Stunting* dan Edukasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dengan food model per posyandu maka dapat dilihat secara :

1. Efektivitas

Ketiga program yang di wujudkan dengan tiga kegiatan tersebut telah berjalan sesuai perencanaan, target dan sasaran dapat tercapai demikian juga dengan tujuannya sehingga dapat dikatakan program tersebut telah efektif.

2. Efisiensi

Kedua program yang di wujudkan dengan kegiatan Sosialisasi, Motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE KB) dan kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneed* dan edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model per posyandu dapat dikatakan efisien secara penggunaan keuangan juga hal tersebut terjadi karena adanya swadaya, tetapi satu kegiatan yaitu tangani *Stunting* dengan JABAT tangani *stunting* tidak efisien karena pendaan difokuskan pada 2 kegiatan yang lain.

3. Kecukupan

Ketiga program yang di wujudkan dengan tiga kegiatan Sosialisasi, Motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE KB) dan kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneed*, tangani *Stunting* dengan JABAT tangani *stunting* dan

edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model per posyandu dapat memenuhi dan sesuai harapan warga Punggawan.

anak (PMBA) dengan food model per posyandu memiliki ketepatan sebagai program meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Punggawan.

4. Responsivitas

Dua kegiatan yaitu Sosialisasi, Motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE KB) dan kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneed* dan edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dengan food model per posyandu mendapat respon baik karena mampu memberikan harapan masyarakat Punggawan dan pemenuhan pengetahuan, kegiatan tangani *Stunting* dengan JABAT tangani *stunting* mendapatkan tanggapan memberatkan masyarakat Punggawan jika penanganan *stunting* di bebaskan dengan biaya mandiri.

5. Ketepatan

Ketiga program yaitu Sosialisasi, motivasi dan Komunikasi Informasi Edukasi KB (KIE KB) dan Kunjungan rumah yang terjadwal kepada pasangan usia subur *unmetneed*. Tangani *Stunting* dengan JABAT tangani *stunting* dan Edukasi pemberian makanan bayi dan

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet, Yulius. “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2019
- Kuncoro, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Laksono, Taufik Budi. (2013). *Kebahagiaan Narapidana Remaja Putri*. Skripsi (diterbitkan). Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Hetzer, E. 2012. *Central and Regional Government*, Jakarta: Gramedia
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Sulaeman, Affan, 1998, *Public Policy, Kebijakan Pemerintah*, Kerjasama UNPAD –IIP, Bandung

<https://www.bkkbn.go.id/berita-inpres-kampung-kb-perkuat-institusi-keluarga>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/02/solo-kota-terpadat-di-jawa-tengah-pada-2021>